

## **Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Negara Berkembang**

**Fahreza Permana<sup>1</sup>, Dhany Saputra Sembiring<sup>2</sup>, Yusuf Akbar Raya Harahap<sup>3</sup>, Muhammad Arfan Harahap<sup>4</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Corresponding Author: [fahrezapermana0@gmail.com](mailto:fahrezapermana0@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ghanysaputrasinulaki@gmail.com](mailto:ghanysaputrasinulaki@gmail.com)<sup>2</sup>, [yar.hrp@gmail.com](mailto:yar.hrp@gmail.com)<sup>3</sup>, [muhhammadarfanharahap@gmail.com](mailto:muhhammadarfanharahap@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Info Artikel**

**Submitted:** 01 Januari 2026

**Revised :** 04 Januari 2026

**Accepted:** 15 Januari 2026

**Published:** 21 Januari 2026

**Keywords:** monetary policy, developing countries, welfare, inflation control, economic growth, poverty reduction

**Kata Kunci:** kebijakan moneter, negara berkembang, kesejahteraan, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effectiveness of monetary policy instruments in enhancing societal welfare in developing countries by addressing macroeconomic stability, poverty reduction, and inequality mitigation. It employs a qualitative Systematic Literature Review (SLR) method, synthesizing 20-30 peer-reviewed sources from 2019-2025 through thematic content analysis, with a descriptive-comparative design focusing on cases like Indonesia, India, and Brazil. Key findings reveal that contractionary policies effectively control inflation (e.g., reducing it from 5.95% to 2.61% in Indonesia), expansionary measures stimulate GDP growth (1-2% short-term) and lower poverty rates (e.g., from 9.78% to 9.36%), though challenged by weak financial markets and external shocks.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas instrumen kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang melalui stabilitas makroekonomi, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) kualitatif, mensintesis 20-30 sumber peer-reviewed periode 2019-2025 dengan analisis konten tematik dan desain deskriptif-komparatif pada kasus seperti Indonesia, India, dan Brasil. Hasil utama menunjukkan kebijakan kontraktif efektif mengendalikan inflasi (misalnya dari 5,95% menjadi 2,61% di Indonesia), kebijakan ekspansif merangsang pertumbuhan PDB (1-2% jangka pendek) dan menurunkan kemiskinan (dari 9,78% menjadi 9,36%), meski terhambat pasar keuangan lemah dan guncangan eksternal.*



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara**

### **Pendahuluan**

Kebijakan moneter merupakan instrumen utama yang digunakan bank sentral untuk mengendalikan pasokan uang, suku bunga, dan stabilitas harga, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Di tengah tantangan struktural seperti kemandirian pada komoditas ekspor dan pasar keuangan yang dangkal, efektivitas kebijakan ini menjadi krusial untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Latar belakang ini membahas

## ***Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Negara Berkembang***

*Fahreza Permana<sup>1</sup>, Dhany Saputra Sembiring<sup>2</sup>, Yusuf Akbar Raya Harahap<sup>3</sup>, Muhammad Arfan Harahap<sup>4</sup>*

evolusi, tantangan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan(Sasmiharti, 2025).

Kebijakan moneter didefinisikan sebagai upaya bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar guna mencapai stabilitas makroekonomi, termasuk pengendalian inflasi dan dukungan pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara berkembang, tujuannya tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang meningkatkan akses kredit bagi masyarakat rendah. Instrumen utama meliputi suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, cadangan wajib, dan intervensi valuta asing, yang semuanya mempengaruhi daya beli dan lapangan kerja(Sodik et al., 2024). Efektivitas instrumen ini sering kali terbatas oleh faktor institusional seperti kredibilitas bank sentral yang rendah, sehingga memerlukan koordinasi dengan kebijakan fiskal.

Perkembangan negara yang ditandai dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, ketergantungan impor barang, dan sektor informal yang dominan, membuat transmisi kebijakan moneter kurang mulus dibandingkan negara maju. Pasar keuangan yang kurang dalam menyebabkan kebijakan suku bunga tidak sepenuhnya mempengaruhi kredit riil, sementara penurunan nilai tukar melemahkan inflasi pangan yang berdampak pada kesejahteraan rumah tangga miskin. Selain itu, globalisasi menambah tekanan eksternal seperti kenaikan harga komoditas global. Studi menunjukkan bahwa di era globalisasi, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan BI Rate dalam mempengaruhi PDB dan inflasi.

Efektivitas kebijakan moneter di negara berkembang sering terhambat oleh keterlambatan transmisi yang panjang akibat dominasi sektor informal dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Inflasi yang fluktuatif, dipicu oleh guncangan pasokan seperti bencana alam atau krisis pangan, mengurangi daya beli kelompok rentan dan memperlemah kanal kredit. Faktor politik yang tidak stabil juga mencakup independensi bank sentral, ekspektasi menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Penelitian literatur review menemukan bahwa penargetan inflasi berhasil di negara dengan sistem keuangan yang kuat, tapi terbatas di yang lemah.

Kebijakan moneter yang ekspansif, seperti penurunan suku bunga, dapat merangsang investasi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga mengurangi kemiskinan dan kemiskinan. Namun, jika inflasi meningkat tinggi, hal itu justru menurunkan kesejahteraan dengan menggerus pendapatan riil masyarakat miskin yang tidak memiliki aset lindung nilai. Di negara berkembang, stabilitas harga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan melalui pertumbuhan inklusif(Sari et al., 2021). Analisis menunjukkan suku bunga mempengaruhi kemiskinan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Beberapa penelitian empiris, seperti di lima negara Asia Tenggara, menemukan bahwa kebijakan moneter kontraktif efektif mengendalikan inflasi namun memperlambat pertumbuhan, sementara ekspansif mendukung kesejahteraan jangka pendek. Di Uganda, penguatan moneter mengurangi kredit namun menstabilkan perekonomian di daerah maju secara finansial. Hasil campuran ini menekankan perlunya pendekatan kontekstual.

Tinjauan literatur global menyimpulkan faktor seperti independensi bank sentral mempengaruhi dampak pada pertumbuhan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan, negara berkembang perlu memperkuat kerangka penargetan inflasi dan digitalisasi keuangan guna mempercepat transmisi kebijakan. Sinergi dengan kebijakan fiskal yang tepat sasaran, seperti subsidi pangan, dapat memitigasi dampak negatif inflasi pada masyarakat miskin. Di masa depan, adaptasi terhadap gangguan digital dan perubahan iklim menjadi kunci (Lubis, 2023).

## **Kajian Teori**

### **Pengertian Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter merupakan strategi yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga guna mencapai stabilitas makroekonomi, seperti pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di negara berkembang, kebijakan ini sering kali bersifat ekspansif untuk merangsang pertumbuhan melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka (OPT), fasilitas diskonto, dan cadangan wajib minimum, meskipun menghadapi kendala seperti ketergantungan pada impor dan volatilitas modal asing. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga sebagai prasyarat kesejahteraan masyarakat, karena inflasi tinggi dapat menggerus daya beli rumah tangga miskin.

### **Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter**

Mekanisme transmisi kebijakan moneter di negara berkembang melibatkan proses kompleks dari perubahan instrumen bank sentral ke variabel ekonomi riil melalui saluran suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Menurut Taylor (1995), transmisi ini mengubah keputusan moneter menjadi perubahan GDP riil dan inflasi, dimulai dari pengendalian base money yang dikalikan money multiplier menjadi uang beredar. Di konteks negara berkembang, saluran nilai tukar sering dominan karena keterbukaan ekonomi, di mana depresiasi mata uang dapat merangsang ekspor tapi juga memicu inflasi impor, memengaruhi kesejahteraan melalui fluktuasi harga pangan (Nasution et

al., 2024).

### **Tantangan di Negara Berkembang**

Negara berkembang menghadapi tantangan unik seperti pasar keuangan dangkal, dominasi perbankan, dan kerentanan terhadap guncangan eksternal, yang melemahkan transmisi kebijakan moneter. Natural Rate Hypothesis menyatakan efektivitas hanya jangka pendek karena ekspektasi rasional membuat kebijakan netral jangka panjang, sementara fluktuasi modal asing memperburuk volatilitas nilai tukar. Hal ini menghambat peningkatan kesejahteraan, karena kebijakan kontraktif untuk kendalikan inflasi sering menekan pertumbuhan dan lapangan kerja di sektor informal yang dominan (Nur et al., 2024).

### **Efektivitas terhadap Kesejahteraan**

Efektivitas kebijakan moneter diukur dari kemampuannya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan riil melalui stabilitas harga dan output gap yang rendah. Studi di negara berkembang menunjukkan inflation targeting lebih efektif daripada exchange rate targeting dalam meredam guncangan global, karena memungkinkan otonomi moneter dan mengurangi volatilitas inflasi yang merugikan masyarakat miskin. Namun, integrasi dengan kebijakan makroprudensial diperlukan untuk hindari risiko sovereign default yang memperburuk kesejahteraan.

### **Paradigma Baru dan Implikasi**

Paradigma baru pasca-krisis 2008 mengintegrasikan inflation targeting fleksibel dengan stabilitas keuangan (*Integrated Inflation Targeting Framework*), menggunakan policy mix moneter-makroprudensial untuk tingkatkan welfare di emerging economies. Di low-income countries, framework moneter yang sistematis berhasil turunkan inflasi ke single-digit, meski efek GDP lebih besar pada rezim fixed exchange rate. Implikasi bagi kesejahteraan adalah pengurangan volatilitas spreads dan inflasi, meskipun memerlukan kredibilitas bank sentral kuat.

### **Metode Penelitian**

#### **Pengertian dan Paradigma Penelitian Kualitatif**

Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-ekonomi melalui interpretasi data deskriptif, bukan pengukuran numerik. Dalam konteks literature review, paradigma ini mengadopsi konstruksi sosial di mana efektivitas kebijakan moneter dipahami sebagai konstruksi kontekstual yang dipengaruhi faktor institusional seperti kredibilitas bank sentral dan kedalaman sistem keuangan di negara berkembang. Metode ini bersifat eksploratif, inductive,

dan fleksibel, memungkinkan peneliti untuk membangun teori dari sintesis literatur yang ada.

Literature review kualitatif berbeda dari kuantitatif karena tidak bergantung pada meta-analisis statistik, melainkan pada analisis konten tematik untuk mengungkap narasi tentang bagaimana instrumen moneter seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka memengaruhi kesejahteraan melalui stabilitas harga dan pertumbuhan inklusif. Paradigma ini selaras dengan ontologi relativis dan epistemologi subjektif, di mana pengetahuan tentang kebijakan moneter dibangun dari perspektif multi-sumber literatur (Rojaki, 2024).

### **Desain Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

Desain penelitian mengikuti Systematic Literature Review (SLR) sebagai bentuk literature review kualitatif yang terstruktur, mencakup identifikasi, seleksi, dan evaluasi literatur relevan dari 2019-2025 terkait efektivitas kebijakan moneter. Pertanyaan penelitian utama meliputi: (1) Bagaimana instrumen kebijakan moneter memengaruhi stabilitas makroekonomi di negara berkembang? (2) Apa faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat? (3) Apa kesenjangan penelitian untuk rekomendasi kebijakan masa depan? Desain ini bersifat deskriptif-komparatif dengan studi kasus negara seperti Indonesia, India, dan Brasil.

Populasi literatur adalah artikel jurnal, laporan IMF/Bank Dunia, dan tesis tentang kebijakan moneter di negara berkembang, dengan sampel purposif sebanyak 20-30 sumber berbasis kriteria inklusi: relevansi topik, publikasi peer-reviewed, dan periode terkini. Desain ini memastikan saturasi tematik untuk menghindari bias subjektif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga**

Kebijakan moneter kontraktif, seperti kenaikan suku bunga yang mengacu pada bank sentral, efektif mengendalikan inflasi di negara berkembang dengan menekan jumlah uang yang beredar melalui pengurangan likuiditas perbankan. Mekanisme ini bekerja melalui saluran transmisi suku bunga, di mana biaya pinjaman yang lebih tinggi mengurangi konsumsi dan investasi, sehingga menurunkan tekanan permintaan agregat terhadap harga barang dan jasa. Di Indonesia, misalnya, Bank Indonesia sering menerapkan BI Rate yang lebih tinggi untuk merespons gejolak harga pangan dan impor, yang berhasil menjaga inflasi dalam koridor target 2-4% meskipun menghadapi krisis global (Umam & Astuti, 2025).

Stabilitas harga yang dicapai melalui pendekatan ini melindungi daya beli masyarakat dengan

## ***Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Negara Berkembang***

*Fahreza Permana<sup>1</sup>, Dhany Saputra Sembiring<sup>2</sup>, Yusuf Akbar Raya Harahap<sup>3</sup>, Muhammad Arfan Harahap<sup>4</sup>*

kehidupan rendah, terutama kelompok rentan seperti pekerja informal dan rumah tangga pedesaan yang bergantung pada barang-barang pokok. Inflasi rendah mencegah erosi nilai tabungan dan pendapatan tetap, sehingga meningkatkan kesejahteraan secara tidak langsung melalui pengurangan beban biaya hidup sehari-hari, seperti harga beras, bahan bakar, dan obat-obatan. Studi empiris di negara berkembang menunjukkan bahwa penurunan inflasi sebesar 1% dapat meningkatkan indeks kesejahteraan rumah tangga hingga 0,5-1%, karena mengurangi kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Selain itu, stabilitas ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi, yang mendorong konsumsi jangka panjang (Firdaus et al., 2025).

Instrumen pendukung seperti operasi pasar terbuka (OPT) dan giro wajib minimum (GWM) memperkuat efektivitas kebijakan kontraktif dengan menyerap kelebihan likuiditas dari sistem keuangan. Di negara-negara seperti India dan Brasil, OPT berhasil menstabilkan harga pasca-pandemi dengan menerbitkan surat berharga negara, yang mengurangi M2 (uang beredar luas) dan menekan ekspektasi inflasi. Kerangka inflasi penargetan (IT) yang diterapkan sejak akhir tahun 1990-an di banyak negara berkembang telah terbukti meningkatkan kredibilitas bank sentral, sehingga mempercepat konvergensi inflasi ke sasaran. Namun, efektivitas ini bergantung pada kedalaman pasar keuangan; di negara dengan sistem perbankan dominan, transmisi ke sektor riil lebih lambat (Triwahyuni, 2021).

Meskipun demikian, pengendalian yang berlebihan melalui kebijakan ketat dapat memicu resesi, dimana pertumbuhan ekonomi melambat akibat menurunnya investasi dan konsumsi swasta. Kenaikan suku bunga 200 basis poin, seperti yang dilakukan BI pada tahun 2022-2023, memang menurunkan inflasi dari 5,95% menjadi 2,61%, namun juga memperlambat PDB dari 5,3% menjadi 4,9% dan meningkatkan kerusakan struktural. Dampak paling terasa pada sektor manufaktur dan UMKM, pada terhambatnya akses kredit, sehingga mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Pasar tenaga kerja di negara berkembang yang sudah fleksibel menjadi lebih rentan, dengan tingkat kemiskinan muda mencapai 15-20%.

Tantangan utama di negara berkembang adalah volatilitas eksternal, seperti menurunnya harga komoditas dan arus modal asing, yang meningkatkan transmisi kebijakan moneter. Ketika harga minyak dunia naik, inflasi impor mendominasi, sehingga kenaikan suku bunga domestik saja tidak cukup tanpa intervensi nilai tukar. Selain itu, rendahnya literasi keuangan masyarakat membuat ekspektasi inflasi sulit dikendalikan, sering menyebabkan spiral harga-gaji. Untuk mengatasinya, bank sentral perlu melakukan koordinasi dengan kebijakan fiskal, seperti subsidi yang ditargetkan,

agar pengendalian inflasi tidak mengorbankan inklusivitas kesejahteraan.

Pada akhirnya, efektivitas pengendalian inflasi bergantung pada keseimbangan antara ketat dan longgar, dengan mempertimbangkan siklus ekonomi. Di Asia Tenggara, pengalaman menunjukkan bahwa bimbingan ke depan dan komunikasi transparan meningkatkan dampak kebijakan hingga 30%. Namun, tanpa reformasi struktural seperti digitalisasi perbankan, risiko trade-off antara stabilitas harga dan pertumbuhan akan tetap tinggi sehingga mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang masyarakat (Jalil et al., 2024).

## **2. Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi**

Instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka (OPT) dan penurunan cadangan wajib minimum (Giro Wajib Minimum/GWM) menjadi alat utama untuk mendorong ekspansi kredit di negara berkembang. Melalui OPT, bank sentral membeli surat berharga pemerintah untuk memenuhi likuiditas ke sistem perbankan, sehingga menurunkan suku bunga pasar dan mendorong bank komersial memperluas pinjaman kepada sektor swasta. Penurunan GWM juga membebaskan dana bank yang sebelumnya “terkunci”, meningkatkan kemampuan kreditasi hingga 10-20% dari basis moneter, yang secara langsung memicu investasi di sektor riil seperti manufaktur dan infrastruktur.

Mekanisme transmisi ini bekerja melalui saluran kredit dan suku bunga, dimana penurunan biaya dana murah merangsang permintaan agregat. Di negara berkembang seperti Indonesia dan India, kebijakan ekspansif ini telah terbukti meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 1-2% dalam jangka pendek, sebagaimana ditunjukkan oleh studi empiris yang menganalisis data panel 44 negara berkembang. Multiplier effect muncul ketika investasi swasta naik, menciptakan efek berantai pada konsumsi rumah tangga dan lapangan kerja, sehingga pendapatan nasional melonjak dan kesejahteraan masyarakat meningkat melalui peningkatan upah riil. Misalnya, selama pemulihan pasca krisis 2008, OPT oleh bank sentral emerging market berhasil mendorong rebound pertumbuhan hingga 4-5% per tahun (Hameed et al., 2024).

Koordinasi dengan kebijakan fiskal memperkuat dampak stimulasi ini, di mana pengeluaran pemerintah yang ditargetkan dapat mengaplikasi efek moneter melalui sinergi. Kebijakan moneter longgar dikombinasikan dengan stimulus fiskal seperti infrastruktur meningkatkan efisiensi transmisi, karena fiskal menangani sisi struktural sementara fokus moneter pada likuiditas. Namun, volatilitas eksternal seperti rendahnya harga komoditas dan arus modal asing sering melonjaknya

transmisi, terutama di negara-negara dengan pasar keuangan yang rendah dan dollarisasi yang tinggi. Di Amerika Latin, misalnya, modal arus yang tiba-tiba berhenti dapat mempertahankan efek ekspansi menjadi kontraksi.

Studi Mishra dan Montiel (2013) menegaskan bahwa efektivitas instrumen ini lebih tinggi di negara dengan bank sentral kredibel dan sistem perbankan matang, di mana kanal kredit berkontribusi hingga 60% terhadap variasi output. Sebaliknya, di negara dengan sektor informal yang dominan, transmisinya lemah karena akses kredit terbatas bagi UMKM. Data IMF menunjukkan bahwa emerging market dengan penargetan inflasi mengalami respons pertumbuhan lebih cepat terhadap guncangan moneter positif dibandingkan rezim nilai tukar tetap. Untuk mengoptimalkannya, bank sentral perlu melakukan diversifikasi instrumen, seperti forward bimbingan untuk mengelola ekspektasi.

Tantangan utama di negara berkembang adalah transmisi asimetri, dimana kebijakan ekspansif efektif untuk pertumbuhan namun rentan memicu inflasi jika tidak mencakupnya. Penelitian Aizenman dkk. (2016) menemukan bahwa koordinasi moneter-fiskal mengurangi risiko ini, dengan pertumbuhan berkelanjutan hingga 3-4% di Asia Tenggara. Selain itu, digitalisasi perbankan baru-baru ini mempercepat transmisi, memungkinkan respons lebih tepat waktu terhadap guncangan global seperti pandemi. Di Indonesia, penurunan BI Rate pasca-COVID mendorong pertumbuhan kredit sebesar 12%, berkontribusi pada rebound PDB 5% pada tahun 2022 (Zein et al., 2024).

Pada akhirnya, untuk memaksimalkan kesejahteraan, kebijakan moneter harus inklusif, menargetkan kredit untuk sektor pedesaan dan pengusaha perempuan. Reformasi struktural seperti penguatan regulasi perbankan dan inklusi keuangan dapat meningkatkan multiplier effect hingga dua kali lipat. Empiris dari 20 penelitian (2019-2024) menunjukkan bahwa negara dengan kerangka adaptif mencapai stabilitas dan pertumbuhan secara simultan, membuktikan potensi besar stimulasi moneter di tengah dinamika global.

### **3. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan**

Kebijakan moneter yang ekspansif, seperti penurunan suku bunga acuan dan peningkatan jumlah uang beredar, berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di negara berkembang dengan merangsang permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Di Indonesia dan Thailand, kebijakan ini terbukti efektif melalui hubungan negatif antara pertumbuhan uang yang beredar dengan indeks kemiskinan,

## ***Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Negara Berkembang***

*Fahreza Permana<sup>1</sup>, Dhany Saputra Sembiring<sup>2</sup>, Yusuf Akbar Raya Harahap<sup>3</sup>, Muhammad Arfan Harahap<sup>4</sup>*

dimana peningkatan likuiditas mendorong investasi sektor riil dan mengurangi kemiskinan struktural. Misalnya, selama periode pasca-pandemi, Bank Indonesia dan Bank of Thailand menerapkan pelonggaran kuantitatif yang berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dari 9,78% menjadi 9,36% di Indonesia pada tahun 2022-2023.

Efek positif ini didukung oleh saluran transmisi moneter melalui kredit murah, yang memungkinkan UMKM berkembang dan menyerap tenaga kerja dari kalangan miskin perkotaan. Studi empiris di Asia Tenggara menunjukkan bahwa setiap 1% peningkatan uang yang beredar dapat menurunkan kemiskinan hingga 0,5% dalam jangka pendek, terutama di negara-negara dengan sektor informal yang dominan seperti Indonesia dan Thailand. Selain itu, stabilitas nilai tukar yang dijaga melalui intervensi moneter mencegah depresiasi rupiah atau baht yang sering membantu impor pangan, sehingga melindungi daya beli kelompok rentan. Namun, keberhasilan ini bergantung pada koordinasi dengan kebijakan fiskal, seperti subsidi langsung tunai (BLT) yang memperkuat multiplier effect moneter (Angelika et al., 2024).

Meskipun demikian, kebijakan moneter ekspansif juga menimbulkan risiko inflasi sampingan yang justru melemahkan ketimpangan bagi kelompok miskin, karena kenaikan harga pangan dan energi mempengaruhi mereka lebih tajam dibandingkan kelas menengah atas yang memiliki aset keuangan. Target inflasi di atas (misalnya >5% di Indonesia) mengerosi pendapatan riil pekerja informal, yang mencapai 60% angkatan kerja, sehingga memperlebar rasio Gini dari 0,38 menjadi 0,39 pada periode ekspansi moneter 2021-2022. Penelitian menggunakan model SVAR menegaskan bahwa shock kontraktif moneter justru meningkatkan ketimpangan jangka panjang, sementara ekspansif menguranginya melalui penciptaan lapangan kerja, meskipun efek redistribusi negatif dari inflasi tetap dominan bagi rumah tangga bawah (Putri & Wasiaturrahma, 2019).

Di negara berkembang, ketimpangan pendapatan sering memburuk karena transmisi moneter tidak merata: rumah tangga kaya lebih diuntungkan oleh penurunan suku bunga melalui portofolio aset, sementara buruh bergantung pada upah yang lambat beradaptasi. Di Thailand, kebijakan moneter longgar pasca-2018 menurunkan kemiskinan dari 6,8% menjadi 6,2%, namun rasio Gini naik 0,02 poin akibat inflasi pangan yang mencapai 7%. Panel studi di ASEAN menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar menjadi indikator utama kemiskinan di Thailand dan Filipina, tetapi inflasi menjadi penghambat utama di Indonesia, di mana kenaikan 1% inflasi menambah 2,3% penduduk miskin. Oleh karena itu, pengendalian inflasi melalui operasi pasar terbuka krusial untuk menjamin pemerataan manfaat moneter.

Untuk mengoptimalkan dampak, bank sentral di negara-negara berkembang perlu mengadopsi panduan ke depan dan alat makroprudensial untuk memitigasi efek samping inflasi terhadap ketimpangan. Di Indonesia, kombinasi kebijakan moneter dengan program perlindungan sosial seperti Kartu Prakerja telah berhasil menekan ketimpangan selama ekspansi, dengan penurunan Gini 0,01 poin pada tahun 2023. Thailand juga menerapkan pinjaman bertarget untuk UMKM, yang memperkuat saluran kredit moneter ke kelompok miskin. Namun, tantangan struktural seperti pasar keuangan meremehkan efektivitas, sehingga reformasi jangka panjang diperlukan (Hariadi et al., 2025).

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan moneter ekspansif efektif menurunkan kemiskinan melalui pertumbuhan inklusif, pengelolaan inflasi tetap menjadi kunci untuk menghindari peningkatan ketimpangan. Bukti empiris dari Indonesia dan Thailand menekankan perlunya keseimbangan antara stimulus moneter dan stabilitas harga, dengan rekomendasi penguatan koordinasi BI-BI dan BOT untuk hasil yang lebih adil. Pendekatan ini dapat ditingkatkan dengan data real-time untuk respons cepat terhadap guncangan eksternal.

#### **4. Tantangan Transmisi di Negara Berkembang**

Efektivitas kebijakan moneter di negara berkembang sering kali terhambat oleh pasar keuangan yang lemah dan dangkal, di mana kedalaman pasar obligasi dan saham masih terbatas, sehingga saluran transmisi melalui suku bunga dan aset tidak berjalan optimal. Hal ini menyebabkan perubahan suku bunga acuan oleh bank sentral sulit dipertahankan ke tingkat pinjaman riil pada perbankan komersial, yang pada akhirnya berdampak terhadap aktivitas ekonomi riil.

Pasar keuangan yang kurang berkembang juga diperparah oleh tingginya informalitas ekonomi, di mana sebagian besar transaksi terjadi di luar sistem perbankan formal, sehingga kebijakan moneter gagal mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi masyarakat luas. Menurut studi literatur, mekanisme transmisi di negara berkembang melibatkan interaksi kompleks antara bank sentral, perbankan, dan pelaku ekonomi, tetapi sering terganggu oleh kurangnya persaingan di sektor perbankan dan dominasi sektor informal. Akibatnya, inklusivitas kesejahteraan menjadi sulit dicapai karena manfaat kebijakan hanya dirasakan oleh segmen ekonomi formal.

Ketergantungan yang tinggi pada komoditas ekspor menambah kerumitan transmisi, karena rendahnya harga komoditas global seperti minyak, batubara, atau hasil pertanian secara langsung mempengaruhi neraca perdagangan dan inflasi impor, yang sering kali meniadakan upaya stabilisasi

moneter domestik. Di negara-negara seperti Indonesia atau Nigeria, siklus komoditas menyebabkan volatilitas nilai tukar yang ekstrem, sehingga bank sentral terpaksa fokus pada intervensi instrumen daripada pengendalian inflasi jangka panjang. Kondisi ini memperlemah kemampuan kebijakan moneter untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan, terutama bagi petani dan pekerja sektor primer yang rentan terhadap guncangan eksternal.

Arus modal asing yang fluktuatif menjadi tantangan utama lainnya, di mana aliran modal panas tiba-tiba berhenti atau berbalik dapat memicu krisis mata uang, memaksa bank sentral menaikkan suku bunga secara drastis untuk mempertahankan kredibilitas. Globalisasi finansial membuat negara berkembang rentan terhadap kebijakan moneter negara maju, seperti kenaikan suku bunga Federal Reserve AS yang memicu pelarian modal. Hal ini tidak hanya mengganggu transmisi domestik tetapi juga menimbulkan trade-off antara nilai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat terganggu oleh resesi yang ditimbulkannya.

Kredibilitas bank sentral yang rendah akibat intervensi politik historis juga menghambat ekspektasi inflasi yang tertanam, di mana masyarakat dan pasar enggan mempercayai komitmen terhadap target inflasi. Di banyak negara berkembang, sejarah hiperinflasi atau manipulasi moneter untuk pembiayaan fiskal membuat transmisi kebijakan menjadi lambat dan tidak dapat diandalkan. Dampaknya, kebijakan kontraktif gagal menekan permintaan agregat secara efektif, sementara kebijakan ekspansif berisiko memicu gelembung aset.

Reformasi kelembagaan menjadi krusial, terutama penguatan independensi bank sentral melalui undang-undang yang menjamin otonomi operasional, personel, dan keuangan, sehingga terhindar dari dominasi fiskal pemerintah. Independensi ini memungkinkan bank sentral fokus pada stabilitas harga tanpa tekanan politik jangka pendek, seperti membiayai defisit anggaran melalui pencetakan uang. Studi empiris menunjukkan negara dengan bank sentral independen memiliki inflasi lebih rendah tanpa mengorbankan pertumbuhan, seperti kasus Bank Indonesia pasca krisis 1998.

Penguatan kredibilitas melalui transparansi komunikasi ke depan, bimbingan dan akuntabilitas juga penting, di mana bank sentral secara rutin mempublikasikan proyeksi inflasi dan kebijakan rasional untuk membentuk ekspektasi pasar. Reformasi sektor keuangan, seperti digitalisasi dan peningkatan inklusi finansial melalui fintech, dapat mempercepat transmisi melalui saluran lending yang lebih luas. Namun, tantangan baru seperti mata uang digital menuntut regulasi regulasi untuk menjaga kontrol pasokan uang.

Studi empiris secara konsisten menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan moneter-fiskal adalah kunci adaptasi terhadap dinamika global, di mana kebijakan fiskal pro-siklus melengkapi stabilisasi moneter. Di negara berkembang, integrasi ini mengurangi trade-off kurva Phillips dan meningkatkan efektivitas transmisi, seperti dalam kerangka penargetan inflasi yang fleksibel. Koordinasi yang erat mencegah konflik, seperti ekspansi fiskal yang memicu overheating, sehingga mendukung kesejahteraan melalui pertumbuhan inklusif.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan struktural terus berlanjut, reformasi holistik dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, dengan bukti dari negara-negara Asia Tenggara yang berhasil melakukan transisi pasca-krisis. Strategi kontekstual, termasuk pengelolaan cadangan devisa dan diversifikasi perekonomian, akan memastikan kebijakan moneter memberikan kontribusi optimal terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah globalisasi.

## **SIMPULAN**

Kebijakan moneter kontraktif efektif mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli kelompok rentan seperti pekerja informal, meskipun berisiko memperlambat pertumbuhan PDB dan lapangan kerja di sektor UMKM. Kebijakan ekspansif melalui penurunan suku bunga dan peningkatan likuiditas berhasil merangsang pertumbuhan ekonomi hingga 1-2% serta menurunkan kemiskinan melalui ekspansi kredit dan penciptaan lapangan kerja, seperti terlihat di Indonesia pasca-pandemi. Namun, dampaknya terhadap ketimpangan campuran, karena inflasi sampingan sering memperburuk rasio Gini bagi rumah tangga miskin yang bergantung pada barang pokok.

Pasar keuangan dangkal, sektor informal dominan, ketergantungan komoditas ekspor, dan arus modal fluktuatif menghambat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, menyebabkan keterlambatan dan asimetri efek. Kredibilitas bank sentral rendah akibat intervensi politik serta literasi keuangan rendah memperlemah ekspektasi stabil, sementara globalisasi menambah volatilitas eksternal seperti kenaikan harga impor.

Perkuat independensi bank sentral, adopsi kerangka penargetan inflasi fleksibel, dan koordinasi moneter-fiskal untuk mengurangi trade-off antara stabilitas dan pertumbuhan. Dorong reformasi struktural seperti digitalisasi keuangan, inklusi fintech untuk UMKM, dan diversifikasi ekonomi guna mempercepat transmisi serta memastikan kesejahteraan inklusif. Penelitian masa depan disarankan fokus pada data empiris real-time dan adaptasi terhadap guncangan seperti perubahan

iklim serta mata uang digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Angelika, A., Amelia, L., Maharani, N., Oktaviani, N., Farhan, M., Pratama, M. T., & Nurmayang Sari, R. D. (2024). Dinamika Kebijakan Moneter dan Fiskal : Pengaruhnya terhadap Kemiskinan di ASEAN. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 2802–2811.
- Firdaus, Wati, E., & Amalia, P. (2025). Analisis Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi dan Stabilitas Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 91–101.
- Hameed, G., Usman, M., Bibi, H., & Baber, M. (2024). Optimal Monetary Policy Transmission Mechanism for Economic Growth (In case of Developing Countries). *Journal of Economic Cooperation and Development*, 45(1), 1–26.
- Hariadi, M. F., Saputri, K. D., Valentina, A., & Candra, M. (2025). Dampak Kebijakan Moneter terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(3), 319–326.
- Jalil, A., Kasmelly, S., & Agustia, I. (2024). Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Tengah Krisis Global. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 105–119.
- Lubis, I. (2023). Analysis Of The Influence Of Monetary Policy On Economic Growth : Case Study In Developing Countries. *Jurnal Stagflasi : Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 19–24.
- Nasution, A. A., Balqis, K. P., Zalyanti, C. A., Sari, I. T., & Batubara, M. (2024). Mekanisme transmisi kebijakan moneter di negara berkembang. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3), 1984–1998.
- Nur, A., Astuti, R. P., Kevi, M., Afif, K., Rahmawati, N. P., & Ayu, N. (2024). Teori Kebijakan Moneter. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 165–168.
- Putri, M. S., & Wasiaturrahma. (2019). Dampak Shock Kebijakan Moneter Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *MediaTrend*, 14(2), 243–258.
- Rojaki, M. (2024). Literature Review : Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Kejuruan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 13–21.
- Sari, W. I., Nasution, L. N., & Novalina, A. (2021). Analisis Leading Indicator Kebijakan Moneter Dalam Mengatasi Kemiskinan Di 5 Negara Asia Tenggara. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(2).

***Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Negara Berkembang***

*Fahreza Permana*<sup>1</sup>, *Dhany Saputra Sembiring*<sup>2</sup>, *Yusuf Akbar Raya Harahap*<sup>3</sup>, *Muhammad Arfan Harahap*<sup>4</sup>

- Sasmiharti, J. (2025). Efektivitas Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Harga di Negara Berkembang : Literature Review. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3849–3855.
- Sodik, F. J., Rachmansyah, F., & Wicaksono, D. (2024). Tantangan dan Peluang Kebijakan Moneter bagi Negara Berkembang di Era Globalisasi. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–7.
- Triwahyuni. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter, dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 199–210.
- Umam, K., & Astuti, R. P. (2025). Efektivitas Instrumen Moneter Dalam Menghadapi Gejolak Ekonomi Di Era Globalisasi. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 268–275.
- Zein, A. S., Hasibuan, W. P. E. S., Saripah, A., Fitriani, Hasibuan, I. H., & Salwa, L. (2024). Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Kindai*, 20(3), 1–4.